

**ANALISIS KEMAMPUAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
DALAM KEMANDIRIAN PEMBIAYAAN FISKAL
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**



Disusun oleh :

Nama : ETTY SUCAHYANI

NIM : 96213056

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2003

**ANALISIS KEMAMPUAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
DALAM KEMANDIRIAN PEMBIAYAAN FISKAL
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh :

ETTY SUCAHYANI

No. Mhs : 96213056

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2004

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL :

**ANALISIS KEMAMPUAN KABUPATEN BELITUNG DALAM
KEMANDIRIAN PEMBIAYAAN FISKAL PEMERINTAH
PUSAT DAN DAERAH**

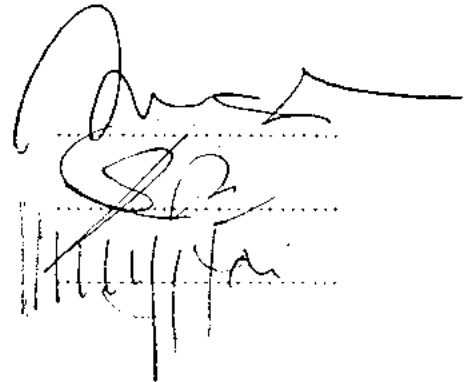
**Disusun oleh : ETTY SUCAHYANI
Nomor Mahasiswa : 96213056**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal 12 Januari 2004**

Penguji I : Drs. Sahabudia Sidig, MA

Penguji II : Drs. Suharto, M.Si

Pembimbing Skripsi : Drs. Unggul Priyadi, M.Si



**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**




I. Suwarsono, MA

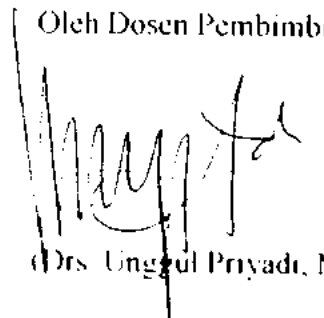
HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEMAMPUAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG DALAM KEMANDIRIAN PEMBIAYAAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Yogyakarta, Desember 2003

Telah disetujui dan Duerima

Oleh Dosen Pembimbing



(Drs. Unggul Priyadi, M.Si)

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan, maka telah selesai (dari segala sesuatu usaha) kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan yang lain)

(Qs. Alam Nasyroh, 6-7)

“Katakanlah, adakah sama orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang berakallah yang dapat menerima pelajaran”

(Qs. Az Zumar, 9)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Qs. Al- Mujadilah: 11)

“Ilmu lebih baik dari pada harta, ilmu akan menjagamu, sedang harta harus engkau jaga. Harta itu akan terkikis habis dan pemupuk harta akan lengkap dengan habisnya kekayaannya”

(HR. Tarmizi-Ibnu majah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan pada:

- *Kedua orang tuaku yang telah mendidikku memberi semangat, materi dan lain-lain.*
- *Bual nenekku yang baik dan begitu menyayangiku*
- *Selaku Isa dan Pipit dan sepupu semuanya*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi ini tidak mendapatkan halangan dan dapat selesai seperti harapan penulis.

Layaknya sebagai sebuah hasil karya, skripsi inipun tidak lepas dari beberapa kekurangan, yang semoga tidak menyimpang dari makna dan tujuan pokok masalah yang kami bahas dalam skripsi ini. Dan dalam semangat untuk memberikan karya yang terbaik, maka saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan lapang dada.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan petunjuk kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini.

1. Bapak Drs. Unggul Priyadi.M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan pelajaran yang berharga berupa sikap kritis dan teliti terhadap penelitian dan membimbing sampai skripsi ini selesai.
2. Bapak Drs. Suwarsono,MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi universitas Islam Indonesia
3. Bapak Drs. Sahabudin Sidiq,MA dan Drs. Suharto,Msi sebagai dosen penguji skripsi.
4. Kedua orang tuaku yang menyayangi, mengasihi dan memberikan perhatian khusus sehingga terselesainya skripsi ini dan telah

membimbing saya sampai saat ini, dorongan untuk maju dan pendidikan yang baik (ibu & bapak)

5. Kedua adikku yang cerewet yang memberi spirit agar cepat selesai yaitu lisdan Pipit.
6. Untuk Eyang putriku yang tercinta, makasih banget atas semua yang telah diberikan untukku.
7. “Unyil”, elu emang baik banget ama aku dan makasih atas semua bantuan yang telah elu berikan padaku.
8. Sahabat seperjuanganku Ita, Asih, Sri, Ariani, Gita kapan lagi kita bisa kumpul bareng.
9. Seseorang yang mengisi hati dan hari-hariku selama enam tahun makasih untuk semua bantuannya.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu.

Wassalamualakum Wr. Wb

Yogyakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Hipotesis Penelitian.....	5
1.6 Metode Penelitian	5
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.6.2 Pengujian Hipotesa	7
1.6.2.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	7
1.6.2.2 Koefisien Regresi Secara Serempak (Uji F).....	8
1.6.3 Pengujian Asumsi Klasik.....	9
1.6.3.1 Uji Autokorelasi.....	9

1.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	10
1.6.3.3 Uji Multikolinearitas.....	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	13
2.1 Hasil Penelitian Sudono Susanto.....	13
2.2 Hasil Penelitian Ardito Bhinadi.....	13
2.3 Hasil Penelitian Elia Radianto.....	14
BAB III LANDASAN TEORI	
3.1 Perkembangan Pembiayaan Fiskal Pusat dan Daerah	16
3.2 Tujuan Pembiayaan Fiskal Pusat-Daerah.....	20
3.3 Kewenangan Daerah Dalam Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	21
3.3.1 Keuangan Daerah.....	21
3.3.1.1 Sumber Pendapatan Daerah	21
3.3.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	24
3.4 Kebijakan Keuangan Negara.....	27
3.4.1 Penerimaan APBN.....	28
3.4.1.1 Penerimaan Dalam Negeri.....	28
3.4.1.2 Penerimaan Pembangunan.....	28
3.4.2 Pengeluaran	29
3.5 Kebijakan Keuangan Daerah.....	29
3.5.1 Penerimaan Daerah.....	30
3.5.1.1 Menurut UU No. 5 th 1974	30

3.5.1.2 Menurut UU No. 22 th 1999	34
3.5.2 Pengeluaran Daerah.....	37
3.5.2.1 Pengeluaran Rutin Daerah.....	37
3.5.2.2 Pengeluaran Pembangunan Daerah	38
3.6 Desentralisasi Fiskal.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN	
4.1 Tinjauan Perekonomian	39
4.1.1 Petumbuhan Ekonomi.....	39
4.1.2 Struktur Perekonomian	41
4.2 Kondisi Perekonomian Daerah	42
4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Ekonomi	43
4.4 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Belitung.....	46
4.5 Keuangan Daerah	46
BAB V ANALISIS DATA	
5.1 Interpretasi Data.....	48
5.1.1 Deskripsi Data.....	48
5.2 Analisis Hasil Regresi	50
5.3 Pengujian Statistik	51
5.3.1 Pengujian Secara Serempak (Uji F. Statistik).....	52
5.3.2 Koefisien Determinasi.....	53
5.3.3 Pengujian Secara Parsial (Uji t Statistik)	53
5.4 Pengujian Asumsi Klasik.....	55
5.4.1 Pengujian Autokorelasi	55

5.4.2	Pegujian Heteroskedastisitas	57
5.4.3	Pengujian Multikolinearitas	58
5.5	Analisis Estimasi	59
BAB IV KESIMPULAN		
6.1	Kesimpulan	60
6.2	Implikasi	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1. Sumber Penerimaan APBD.....	37
4.1. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1997 - 2001.....	40
4.2. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1997 - 2001	41
4.3. Pertumbuhan Ekonomi Persektor Propinsi Bangka Belitung Tahun 1999 – 2001.....	42
4.4. Pertumbuhan PDRB Menurut Harga konstan Kabupaten Belitung Tahun 1998 - 2001.....	43
4.5. Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Belitung Tahun 1998 – 2001	44
5.1 Derajat Fiskal Daerah.....	49
5.2 Rasio Total Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Total Penerimaan.....	50
5.3 Tingkat Perkembangan Ekonomi	50
5.4 Hasil Regresi.....	51
5.5 Hasil Pengujian t – Statistik	53
5.6 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	58
5.7 Hasil Pengujian Multikolinearitas	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan di Indonesia diartikan sebagai usaha perubahan yang dilakukan secara terus menerus menuju peningkatan yang lebih baik yang mengarah pada perubahan, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya sebagai peningkatan kelevel yang lebih tinggi.

Keberhasilan ekonomi daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta dapat dinilai melalui tingkat pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB). Bersumber pada UUD 1945 pasal 33 dan GBHN dengan jelas menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun atas dasar demokrasi ekonomi. Arah demokrasi ekonomi sebagaimana dituangkan dalam GBHN, menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam pembangunan. Sedangkan pemerintah wajib memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang merata baik material maupun spiritual.

Dewasa ini pemerintah mulai menggalakkan pembangunan di daerah. Kebijakan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah, pada mulanya merupakan gagasan untuk melaksanakan desentralisasi penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan konsep desentralisasi diharapkan terjadi pemerataan, efisiensi, efektifitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan tersebut, maka perlu adanya keselarasan pelaksanaan dari pembangunan nasional, sehingga sesuai

dengan pasal 18 UUD 1945 yang dijabarkan dalam undang-undang no. 5 tahun 1974 yang mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah. Undang-undang tersebut meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat daerah yang dirangkum dalam 3 prinsip: pertama, desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintah dari daerah tingkat I kepada daerah tingkat II. Kedua, dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Ketiga, tugas perbantuan yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah (Mudrajat Kuncoro, 1987:406)

Selama pemerintah orde baru telah ditetapkan UU No.5 / 1974 yang menganut prinsip desentralisasi, tapi pada kenyataannya adalah sentralisasi dimana dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan tetap dikontrol oleh pusat. Hal ini terbukti dengan ketergantungan pemerintah daerah terhadap aspek keuangan, keleluasaan bertindak untuk mengambil keputusan dan intervensi pemerintah pusat sangat tinggi terhadap pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan usaha tersebut pemerintah mencoba mengkaji ulang undang-undang yang lama agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar terlaksana dengan baik. Untuk itu dikelurkanlah UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-undang yang baru ini lebih menjelaskan tentang kewenangan-kewenangan yang dilaksanakan pemerintah daerah setempat. Hal ini disebutkan dalam pasal 7 UU No. 22 tahun 1999.

Kewenangan daerah mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, fiscal dan moneter, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pengembangan SDM, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Berdasarkan UU No.22 tahun 1999 banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal-hal tersebut antara lain adalah kemampuan keuangan daerah, ekonomi, geografi dan social budaya. Perbedaan sumber daya akan menyebabkan perbedaan yang cukup berarti bagi daerah yang miskin sumber daya dibanding dengan daerah yang kaya akan sumber daya, karena kemampuan yang berbeda inilah maka penulis berminat untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kemampuan Daerah Kabupaten Belitung Dalam Kemandirian Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah”

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Beberapa masalah dalam kaitannya dengan penelitian tentang kemampuan daerah kabupaten Belitung dalam kemandirian pembiayaan fiskal pemerintah pusat dan daerah, terdapat beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap derajat fiskal daerah. Faktor-faktor tersebut adalah.

1. Rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah.

2. Tingkat perkembangan ekonomi, yaitu laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apakah rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah dan tingkat perkembangan ekonomi secara individu berpengaruh terhadap derajat fiskal daerah.
2. Apakah rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah dan tingkat perkembangan ekonomi secara serempak berpengaruh terhadap derajat fiskal daerah.

1.3 TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah dan tingkat perkembangan ekonomi terhadap derajat fiskal daerah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan bagi pembuat kebijakan, terutama dalam kaitannya untuk pelaksanaan otonomi daerah. Bagi penulis penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh dari bangku kuliah kedalam praktek yang sesungguhnya serta digunakan sebagai syarat selesainya jenjang S1.

1.5 HIPOTESIS PENELITIAN

Berkaitan dengan tujuan penelitian diatas, maka diambil hipotesis sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut: adanya pengaruh positif antara rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan dan laju PDRB terhadap derajat fiskal daerah secara serempak. Sedangkan secara parsial adalah rasio total transfer pemerintah pusat terhadap terhadap total penerimaan berpengaruh signifikan terhadap derajat fiskal daerah dan laju PDRB berpengaruh signifikan terhadap fiskal daerah.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Metode pengumpulan data

Metode yang ditempuh guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam mendukung analisis ini adalah melalui pencatatan angka-angka dan data-data sekunder dari berbagai laporan dan studi kepustakaan diantaranya:

1. Laporan Biro Pusat Statistik
2. Indikator yang diterbitkan BPS.
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di lakukan analisis regresi. Dengan cara ini dapat diketahui seberapa besar hubungan masing-masing variabel independen/variabel yang menjelaskan (rasio total transfer dari pemerintah pusat terhadap total penerimaan,tingkat perkembangan ekonomi yaitu

laju PDRB berdasar harga konstan) terhadap variabel dependen, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y=f(X_1, X_2)$$

Secara umum bentuk persamaan linear adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Derajat fiskal daerah yang diperoleh dengan menggunakan "*administrative independency ratio*" yaitu rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat daerah (juta Rp)

X1 = Rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan (juta Rp)

X2 = Tingkat perkembangan ekonomi yaitu laju PDRB berdasar harga konstan(%)

β_0 = Konstanta

β_1 = koefisien regresi dari X1

β_2 = Koefisien regresi dari X2

1.6.2 Pengujian Hipotesa

1.6.2.1 Pengujian Hipotesis secara parsial

Pengujian koefisien regresi secara individual ini, dengan menggunakan uji t-statistik. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Dalam penelitian ini dan uji statistik dua arah (*two tail test*) dengan langkah-langkah pengujian:

Menentukan Hipotesa

$H_0 : \alpha = 0$, Maka variabel independent tidak berpengaruh secara individual terhadap variabel dependennya.

$H_a : \alpha \neq 0$, Maka variabel independent berpengaruh secara individual terhadap variabel dependennya.

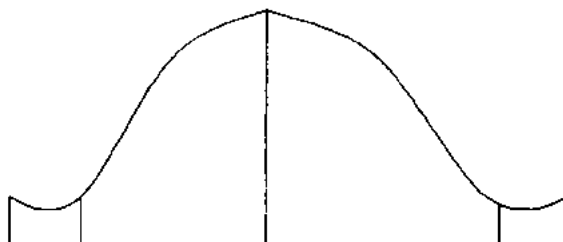
Dengan menggunakan tabel statistik maka:

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_a diterima

Gambar 1

Daerah Kritis Pengujian T-test Dua sisi



Apabila t-hitung didaerah penolakan untuk H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti pengujian signifikan.

1.6.2.2 Koefisien Regresi secara serempak (uji F)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya.

Langkah-langkah pengujian adalah:

1. Menetapkan hipotesis

$$H_0 - \beta_0 = \beta_1 = \beta_2$$

Variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

$$H_0 \neq \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2$$

Variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen

2. Menetapkan daerah kritis melalui F-tabel dan mencari nilai F-hitung. F-hitung dicari dengan rumus :

$$F \text{ Hitung} = \frac{SSR}{SSE} \cdot \frac{(k-1)}{(n-k)}$$

3. Mengambil kesimpulan

Apabila f-hitung didaerah penolakan maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti pengujian signifikan.

1.6.3 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini adalah untuk melihat apakah model yang diteliti terkena penyimpangan klasik atau tidak. Maka pengadaaan pemeriksaan terhadap penyimpangan klasik tersebut harus dilakukan, asumsi yang harus dipenuhi dalam penggunaan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. E_i merupakan variabel random dan mengikuti distribusi normal dengan kesalahan = 0 / $\sum E_i = 0$
2. varian bersyarat dari E_i adalah konstan dan homoskedastisitas
3. Tidak ada autokorelasi
4. Tidak ada multikorelasi

1.6.3.1 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi diantara anggota-anggota rangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson Statistik (DW-test), dengan mekanisme:

1. Melakukan regresi dengan metode OLS, kemudian kita simpan residualnya
2. Menghitung dengan rumus

$$D_{hit} = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e_t^2}$$

Apabila model menggunakan lag dari variabel independent, maka DW tesnya adalah sebagai berikut:

$$H = \sqrt{\frac{N}{1 - N(\sigma^2_{t-1})}}$$

3. Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variable independent tertentu, diperoleh nilai kritis d_l dan d_u dalam tabel distribusi Durbin Watson untuk sebagai nilai σ .

4. Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 = tidak ada autokorelasi

$d < d_l$ = tolak H_0 (ada korelasi +)

$d > 4-d_l$ = tolak H_0 (ada korelasi -)

$d_u < d < 4-d_u$ = terima H_0 (tidak ada korelasi)

$d_l < d < d_u$ = pengujian tidak bisa disimpulkan (inconclusive)

$(4-d_u) < d < (4-d_l)$ = pengujian tidak bisa disimpulkan (inconclusive)

1.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Kasus heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tetap tidak bias tetapi tidak efisien. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan uji Gilester

1.6.3.3 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independent dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independent lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinier adalah dengan langkah pengujian terhadap masing-masing variabel independent. Untuk mengetahui seberapa jauh korelasinya (R^2 variabel) yang didapat kemudian dibandingkan dengan R^2 yang didapat dari hasil regresi secara bersama variabel independent. Jika diperoleh hasil antara R^2 variabel melebihi R^2 pada model regresi, berarti terdapat multikolinearitas dan sebaliknya.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang kajian pustaka atau telaah pustaka dari penelitian sebelumnya yang mendasari pemikiran dan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini

BAB III LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan perundang-undangan yang mendasari penerimaan pemerintah dan definisi yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Berisi gambaran dari daerah penelitian yang meliputi keadaan perekonomian daerah kabupaten Belitung.

BAB V PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN

Memuat tentang isi pokok penelitian yang meliputi: deskripsi data, hasil estimasi, analisis dan interpretasi data baik secara uji t-statistik, uji F-statistik, uji koefisien determinasi (R^2) dan pengujian asumsi klasik (uji autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas)

BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Memuat ungkapan kembali secara singkat permasalahan dan pernyataan dari hasil analisis serta implikasi yang dianggap relevan dalam permasalahan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka membahas tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah:

2.1 Hasil Penelitian Sudono Susanto

Dari hasil penelitian ini dengan judul “Analisa Perkembangan Pembiayaan Pemerintah Pusat dan Daerah” dengan menggunakan metode regresi linear dengan hasil sebagai berikut:

$$Y = 0,6508 - 0,2521X_1 - 0,5546X_2$$

$$R = 0,8752$$

$$D-W = 1,1654$$

$$F\text{-hitung} = 52,597$$

Dimana : Y= Derajat Otonomi Fiskal

X1= Tingkat Perkembangan Ekonomi

X2= Bantuan

Dari pengujian variabel independen secara serempak diperoleh F-tabel sebesar 3,68. Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa derajat otonomi fiskal Daerah Tingkat II Banjar Negara dipengaruhi secara negatif oleh tingkat perkembangan ekonomi daerah dan bantuan dari pemerintah pusat

2.2 Hasil Penelitian Ardito Bhinadi

Dari hasil penelitian ini dengan judul “Analisa Perkembangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah”, dengan menggunakan model regresi diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = -30,65 + 0,05X_1 + 1,29X_2$$

$$R = 0,9416$$

Dimana: Y = Derajat Otonomi Fiskal

X₁ = Tingkat Perkembangan Ekonomi

X₂ = Bantuan

Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa derajat otonomi fiskal Daerah Tingkat II Sleman dipengaruhi secara positif oleh variabel tingkat perkembangan ekonomi dan bantuan pemerintah pusat.

Koefisien regresi tingkat perkembangan ekonomi yang kecil (0,05) menunjukkan bahwa pengaruh tingkat perkembangan ekonomi terhadap derajat otonomi fiskal Dati II Sleman masih rendah. Sedangkan pengaruh bantuan pemerintah pusat terhadap derajat otonomi fiskal Dati II Sleman cukup besar, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi bantuan pemerintah pusat sebesar 1,29.

2.3 Hasil Penelitian Elia Radianto

Dari hasil penelitian dengan judul "Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku" menggunakan model penyesuaian parsial dengan hasil sebagai berikut:

$$Y = -0,5012 + 0,2086X_1 + 0,7760X_2 + 0,0489B_y$$

$$R = 0,9862$$

$$D-W = 2,3725$$

Dimana: Y = Derajat Otonomi Fiskal

X₁ = Tingkat Perkembangan Ekonomi

X₂ = Bantuan

B_y = Derajat Otonomi Tahun Sebelumnya

Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa tingkat perkembangan ekonomi dan bantuan dari pemerintah pusat berpengaruh signifikan pada derajat kepercayaan $\alpha = 5\%$ baik untuk kabupaten di propinsi Maluku maupun penggabungan seluruh Dati II propinsi Maluku.

Selanjutnya nilai R menunjukkan angka yang cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat perkembangan ekonomi (X1) dan bantuan pemerintah pusat (X2) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap variabel derajat otonomi fiskal (Y). Dengan demikian, baik variabel tingkat perkembangan ekonomi maupun variabel bantuan pemerintah pusat berpengaruh secara positif terhadap variabel derajat otonomi fiskal.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Perkembangan Pembiayaan Fiskal Pusat dan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pasal 4 UUD 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya dalam pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau administrasi.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pasal 4 UUD 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya dalam pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau administrasi.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pemerintah dan kepentingan masyarakat dasarkan prinsip-prinsip masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan UUD 1945 ada 6 kekuasaan pemerintahan, yaitu (Sutrisno PH,1986) :

1. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara yang dilakukan oleh pemerintah
2. Kekuasaan kunsultatif, yaitu kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan yang dilakukan oleh DPA.
3. Kekuasaan legislative atau kekuasaan membentuk perundang-undangan neagara yang dilakukan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR
4. Kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif, yaitu kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK.
5. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mempertahankan perundang-undangan negara yang dilakukan oleh MA.

6. Melakukan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dengan presiden sebagai mandataris.

Keenam kekuasaan tersebut merupakan relevansi ekonomi publik di Indonesia. Tugas menyusun, mengesahkan, melaksanakan serta mengadakan pemeriksaan terhadap APBN, mempunyai kaitan erat dengan pembagian enam kekuasaan tersebut. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya dibagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di negara kesatuan, kekuasaan pemerintah yang tertinggi terletak pada pemerintah pusat. Meskipun daerah mempunyai kekuasaan yang nyata dan bertanggung jawab.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab, secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut merupakan landasan pokok dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan merupakan pelaksanaan pasal 18 UUD 1945 dan GBHN.

Perkembangan keuangan pusat dan daerah sesungguhnya timbul akibat dari penyelenggaraan pemerintah berdasar ketiga asas tersebut dan oleh karena itu corak perkembangan keuangan pusat daerah diwarnai oleh hubungan fungsi pusat daerah menurut ketiga asas tersebut (Susiaty B Hirawan, 1986:91).

Berdasarkan asas dekonsentrasi, negara kesatuan RI dibagi dalam wilayah-wilayah administratif yang merupakan lingkungan wilayah jabatan kepada pejabat pusat yang ditempatkan didaerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur-unsur pelaksanaan terutama instansi vertikal yang dikoordinasi oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat tetapi kebijakan terhadap pelaksanaan urusan ini sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan asas perbantuan (*mede bewend*) maka beberapa tugas dan wewenang urusan pusat untuk pelaksanaannya diserahkan kepada dan dilakukan oleh daerah. Dalam hal ini menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan maupun pengawasan serta pembiayaan tetap menjadi tugas dan wewenang pusat, karena itu dikenal adanya "dinas" didaerah.

Dalam perkembangan pembiayaan fiskal pusat dan daerah, maka di Indonesia dikenal empat asas hubungan keuangan, yaitu (Susiaty B Hirawan, 1986):

1. Kegiatan pusat didaerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai oleh pusat.
2. Kegiatan daerah (Dati I, II, Desa) dalam rangka tugas perbantuan dibiayai oleh yang menugaskan.
3. Kegiatan daerah (Dati I, II, Desa) dalam rangka desentralisasi pada dasarnya dibiayai oleh daerah yang bersangkutan.
4. Dalam hal keuangan daerah yang bersangkutan tidak mampu membiayai tugas otonominya, maka pusat akan memberikan sejumlah subsidi.

3.2 Tujuan Pembiayaan Fiskal Pusat Daerah

Hal ini menyangkut pada pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu antara tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan ini. Tujuan utama pembiayaan ini adalah untuk mencapai perimbangan antara berbagai bagian atau pembagian ini agar potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai.

Alokasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mempengaruhi bentuk dan lingkupnya (K.J. Davey, 1998:202):

1. Pembelanjaan Seluruhnya atau sebagian biaya pelayanan atau program-program pembangunan yang kepentingannya bersifat nasional, yaitu dipandang sejalan dengan keinginan kebijaksanaan dan saran pada tingkat nasional.
 2. Mendorong upaya oleh pemerintah daerah oleh program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional.
 3. Merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, baik untuk membantu pertumbuhan maupun mengurangi ketimpangan antar wilayah.
 4. Mengendalikan pengeluaran daerah untuk memastikan penyesuaian terhadap standar dan kebijaksanaan nasional
 5. Memantapkan standar pelayanan atau pembangunan yang adil atau lebih adil.
 6. Mengembangkan wilayah-wilayah untuk mengatasi keadaan darurat.
- Tujuan ini tidaklah berdiri sendiri, tatanan alokasi pusat dapat

dikombinasikan pengendalian dengan perangsang umpan dan cambuk subsidi umum dengan pemerintah.

3.3 Kewenangan Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah

Kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Atas dasar itu UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.

Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

3.3.1 Keuangan Daerah

3.3.1.1 Sumber Pendapatan Daerah

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah pasal 3 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

- Hasil pajak daerah
 - Hasil restribusi daerah
 - Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan giro
2. Dana Perimbangan, terdiri atas:
- Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam
 - Dana alokasi umum
 - Dana alokasi khusus
3. Pinjaman Daerah
4. lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain adalah hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah kabupaten.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemerintah pusat dengan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan

dan pelayanan kepada masyarakat. Secara khusus UUNo. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dengan pusat telah menetapkan landasan yang jelas dalam penetapan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Adapun tujuan UU No. 25 tahun 1999 antara lain :

1. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan pasti.
3. Mewujudkan system perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan bertanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
4. Memberikan acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah
5. Mempertegas system pertanggung jawaban keuangan oleh pemerintah daerah.
6. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

3.3.1.2 anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sarana atau alat dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam penjelasan peraturan daerah nomor 3 tahun 2001 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki fungsi:

- a. Menentukan jumlah pungutan pajak dan restribusi daerah dan pungutan lainnya yang dilakukan kepada masyarakat.
- b. Merupakan sarana mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepada daerah khususnya.
- d. Merupakan sarana untuk melakukan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah didalam batas tertentu.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD.

2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan APBD yang bermula dari rencana pendapatan dan belanja daerah, pembahasaan bersama DPRD dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur). Adanya data yang belum lengkap diterima pada saat penyusunan dan adanya perubahan-perubahaan lainnya, maka dimungkinkan adanya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sama dengan penyusunan APBD. Dalam perubahan APBD pada prinsipnya adalah melakukan penambahan, pengurangan dan penggeseran anggaran.

Penyusunan APBD dilakukan dengan berpegang pada prinsip:

1. Dipegang teguh disiplin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal ini harus diusahakan agar RAPBD dapat diajukan pada DPRD pada waktu yang tepat, sehingga peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dalam jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 64 ayat 2 UU No. 5 tahun 1975).
2. Tetap berpegang teguh pada kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis, yang berarti adanya keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan daerah.
3. Melaksanakan tertib anggaran, yang tercermin dari meningkatnya pendapatan daerah sendiri dan seiring dengan itu harus nyata pula

nampak usaha untuk menertibkan dan mempertanggung jawabkan pengeluaran daerah.

4. Pelaksanaan anggaran yang makin terarah dan dengan pola rencana yang jelas, yaitu untuk pelaksanaan APBD disusun DIKDA / DIPDA.

3. Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam pelaksanaan APBD pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan penyusunan daftar isian kegiatan daerah/ daftar isian priyek daerah (DIKDA/DIPDA), surat permintaan pembayaran, surat keputusan otorisasi yang merupakan bukti tindakan kepala daerah yang akan mengakibatkan pembebanan pada anggaran belanja daerah, surat perintah membayar uang, surat pertanggung jawaban dan laporan harian. Disamping itu secara berkala perlu disusun laporan triwulan. Tata usaha keuangan daerah dilakukan dalam bentuk register, kartu daaftar dan buku.

Dalam pelaksanaan APBD perlu dilakukan tata pembukuan yang pelaksanaannya pada bagian keuangan, dinas/instansi/unit kerja dan pemegang kas daerah. Objek tata pembukuan keuangan daerah adalah pengurusan administrasi dan pengurusan kebendaharaan, yang menimbulkan arus dokumen, arus barang dan arus uang. Melihat jenis pengurusan dalam pengelolaan keuangan ini, maka hakekat pembukuan mengandung unsur-unsur.

1. Pencatatan dalam register/buku-buku yang diperlukan.

2. Sebelum pencatatan dilakukan pemeriksaan yang berupa penelitian atas kebenaran/sahnya yang menyebabkan akibat adanya arus uang dan barang.
3. Pemeriksaan berupa pengujian terhadap sahnya tanda bukti yang diperiksa kesamaan antara jumlah uang yang diterima atau dibiarkan oleh bendaharawan dengan jumlah yang tertera pada dokumen yang menjadi tanda bukti tersebut.
4. Dalam pencatatan yang dilakukan harus ada hubungan yang saling mengatasi (*internal control*) atas register yang dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran.

3.4 Kebijakan Keuangan Negara

Keuangan negara adalah seluruh tatanan, perangkat, lembaga kebijakan penganggaran negara yang meliputi pendapatan dan belanja negara. Kebijakan negara secara garis besarnya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sejak tahun 1969, Indonesia menganut bentuk dan struktur "Anggaran Pendapatan dan Belanja Seimbang", yang berarti seluruh pendapatan sama dengan seluruh pengeluaran. Secara teoritis pendapatan dan belanja seimbang tidak umum dikenal karena keseimbangan dalam anggaran terdapat aliran dan disisi penerimaan yang berasal dari luar negeri. Fungsi pinjaman luar negeri hanya untuk membiayai anggaran belanja pembangunan dan anggaran dinamis, diartikan sebagai absolut yang

peningkatan jumlah tabungan pemerintah surplus dalam belanja rutin sehingga kemampuan untuk menyediakan dana belanja dapat ditingkatkan.

Sumber-sumber pendapatan dibedakan atas penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang merupakan pinjaman dan bantuan luar negeri. Penerimaan dalam negeri ini terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam dan penerimaan diluar migas yang berasal dari penerimaan pajak. Anggaran belanja negara terdiri atas pengeluaran rutin, selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin merupakan tabungan pemerintah dan penerimaan pembangunan merupakan dana pembangunan pemerintah.

3.4.1 Penerimaan APBN

3.4.1.1 Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan dalam negeri dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan pajak. Pajak langsung adalah pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak. Jenis pajak langsung ini diantaranya adalah pajak pendapatan, pajak perseroan dan pajak perseroan minyak. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut tanpa berdasarkan surat ketetapan pajak, misalnya cukai, pajak penjualan, bea masuk dan pajak ekspor. Sampai saat ini penerimaan yang berasal dari pajak selalu menduduki tempat yang dominan.

3.4.1.2 Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek. Bantuan program adalah bantuan yang tidak dikaitkan dengan proyek-proyek tertentu. Bantuan program ini terdiri nilai lawan dari devisa kredit, bantuan pangan, bantuan

pupuk dan sebagainya. Bantuan proyek membantu dana untuk ekspresi, rehabilitasi maupun untuk pembangunan proyek baru yang meliputi bidang telekomunikasi, listrik, pengairan, pendidikan dan prasarana lainnya.

3.4.2 pengeluaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah, pemerintah (dalam arti luas) melaksanakan kegiatan yang konkrit berupa penggunaan barang-barang dan jasa atau sumber daya ekonomi. Dalam menggunakan sumber daya ekonomi tersebut antara lain berupa dan atau dinyatakan dalam penggunaan uang. Penggunaan uang ini merupakan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua golongan, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan fiskal pusat daerah, bantuan pemerintah pusat pada pemerintah daerah tercermin dalam subsidi daerah otonom, yang terdapat dalam anggaran pembangunan. Subsidi daerah otonom merupakan bantuan pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai pada daerah otonom seperti guru, sedangkan bantuan pembangunan mencakup proyek pembangunan inpres.

3.5 Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang ditempuh diarahkan agar pemerintah daerah dapat semakin meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga secara bertahap penyelenggaraan dan pembangunan daerahnya akan semakin banyak dilimpahkan pada daerah.

Peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri diprioritaskan pada penggalan sumber- sumber PAD. Pemerintah daerah diberi kesempatan untuk memungut pajak dan restribusi daerah yang baru diluar pajak yang telah dikenakan oleh pemerintah pusat, sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria pajak dan restribusi yang berlaku.

3. 5.1 Penerimaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut UU No.5 tahun 1974 meliputi: PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan pusat dan penerimaan pembangunan. Menurut UU No.22 tahun 1999 penerimaan daerah meliputi: PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang sah.

3.5.1.1 Menurut UU No.5 tahun 1974

Pendapatan daerah menurut UU No. 5 tahun 1975 meliputi:

I. Pendapatan Asli daerah

Pendapatan asli daerah ini bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, laba BUMD dan penerimaan dari dmas lain.

a Pajak daerah

Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara, yaitu:

- 1) Pembagian hasil pajak yang dikenakan dan dipungut oleh pemerintah pusat.
- 2) Pemerintah daerah dapat memungut tambahan pajak diatas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.
- 3) Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah daerah sendiri.

b. Restribusi daerah

Restribusi daerah merupakan penerimaan dari imbalan jasa yang diperoleh dari pemakain jasa pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah.

c. Laba BUMD

Pemerintah daerah melibatkan diri dalam kegiatan dunia usaha dengan tujuan untuk menyajikan pelayanan dengan pembelanjaan mandiri dan untuk memperoleh keuntungan.

2. Bagi hasil pajak dan bukan pajak

Bagi hasil pajak dan bukan pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan serta iuran hasil hutan dan iuran hak pengusaha hutan

3. Sumbangan dan bantuan pusat

Ada beberapa macam subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah TK I dan TK II untuk proyek-proyek tertentu:

a. Subsidi di daerah otonom

Subsidi ini meliputi gaji dan tunjangan bagi karyawan yang dipekerjakan oleh pemerintah kabupaten dan kotamadya. Subsidi ini mulanya dibayarkan oleh menteri dalam negeri kepada daerah TK I melalui anggaran rutin, subsidi merupakan bagian terbesar dari pembelanjaan pemerintah daerah.

b. Bantuan pembangunan daerah TK I

Subsidi ini dikenal dengan inpres Dati I dan merupakan subsidi untuk berbagai macam tujuan proyek pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah propinsi. Subsidi ini menggantikan Alokasi Devisa Otomatis (ADO) yang besarnya 1 0% dari jumlah ekspor propinsi yang bersangkutan.

c. Bantuan kabupaten

Bantuan kabupaten ini dibayarkan kepada seluruh kabupaten dan kotamadya yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan dalam batas yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

d. Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar

Bantuan ini dialokasikan ke kabupaten dan kotamadya untuk tugas pembangunan pendidikan dan dananya baru dapat dibelanjakan setelah ada persetujuan dari pemerintah propinsi sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

e. Bantuan Sarana Kesehatan

Bantuan ini dapat menyerupai bantuan pembangunan sekolah dasar, tetapi bantuan ini dialokasikan ke kabupaten dan kotamadya untuk tujuan kesehatan.

f. Bantuan Desa

Persetujuan terhadap proyek di masing-masing desa ada ditangan bupati. Persetujuan utama adalah bahwa alokasinya harus untuk bahan bangunan, sedangkan tenaga kerja harus disediakan secara lokal dengan gotong royong oleh desa yang bersangkutan. Jalan desa, jembatan dan saluran air merupakan proyek yang diutamakan lewat bantuan ini.

g. Subsidi Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar

Menteri keuangan memberikan subsidi untuk operasional sekolah dasar, ini menggantikan penerimaan dan uang sekolah yang telah dihapuskan dengan program wajib belajar pada sekolah dasar di Indonesia.

4. Penerimaan pembangunan

Penerimaan pembangunan ini terdiri dari pinjaman pemerintah daerah dan pinjaman untuk BUMD, diantara pinjaman ada 4 cara yang paling menonjol: pertama, sistem disebagian besar jumlah pinjaman diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Kedua, sistem dimana tidak terdapat lembaga perkreditan milik pemerintah yang memberikan pinjaman pada pemerintah daerah. Ketiga, sistem dimana ada lembaga pusat perkreditan yang memberikan pinjaman kepada

pemerintah daerah. Keempat, yaitu besar negara-negara dimana pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah dilakukan oleh suatu lembaga perkreditan.

3.5.1.2 Menurut UU No. 22 tahun 1999

Sumber penerimaan daerah dibedakan atas PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut UU No.25 tahun 1999, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. Pada daerah tingkat I pajak daerah yang dipungut terutama adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

b. Restribusi Daerah

Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai imbalan jasa yang diperoleh dari pemakaian jasa pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Hasil kekayaan daerah merupakan perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan berdasarkan perundang-undangan. Hasil dari perusahaan daerah adalah bagian dari keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain.

d. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain antara lain mencakup penerimaan dari sewa rumah dinas milik daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, penerimaan pihak ketiga dan hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah berita daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing-masing sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi.

a) Penerimaan Dari SDA

1) Sektor Kehutanan

2) Sektor Pertambangan

b) Pajak Bumi dan Bangunan

c) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

d) Dana Alokasi Umum (DAU)

e) Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Pinjaman Daerah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah pemerintah telah melakukan berbagai usaha, antara lain memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah dan BUMD melalui rekening pemerintah daerah. Maksud dan tujuan pemberian pinjaman ini adalah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum serta mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD.

4. Penerimaan lain yang sah

Salah satu penerimaan lain daerah yang sah adalah subsidi daerah otonom, dimana SDO diberikan untuk menunjang kegiatan pemerintah di daerah yang sebagian besar dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan dan pensiun, selebihnya untuk keperluan belanja non pegawai.

Perbedaan sumber-sumber penerimaan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Sumber-Sumber Penerimaan APBD

Sebelum Otonomi Daerah	Setelah Otonomi Daerah
<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD <ul style="list-style-type: none"> - Pajak daerah - Restribusi daerah - Laba BUMD 2. Bagi hasil pajak dan bukan pajak <ul style="list-style-type: none"> - PBB - Iuran hasil hutan - Iuran hak pengusaha hutan 3. Penerimaan pembangunan <ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman pemerintah daerah - Pinjaman untuk BUMD 4. Sumbangan dan bantuan pusat <ul style="list-style-type: none"> - Subsidi daerah otonom - Bantuan pembangunan DATI I - Bantuan kabupaten - Bantuan pembangunan SD - Bantuan sarana kesehatan - Bantuan desa - SubsidipembiayaanpenyelenggaraanSD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD <ul style="list-style-type: none"> - Pajak daerah - Restribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah 2. Dana perimbangan <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan dari SDA - PBB - Bea perolehan hak atas tanah bangunan - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus 3. Pinjaman daerah 4. Penerimaan lain yang sah <ul style="list-style-type: none"> - Subsidi daerah otonom

Sumber: UUNo.5 tahun 1974 dan UU No.22 tahun 1999

3.5 2 Pengeluaran Daerah

3.5.2.1 Pengeluaran Rutin Daerah

Pengeluaran rutin daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari pemakaian dana-dana untuk menunjang pelaksanaan pemerintah didaerah. disamping kegiatan yang bersifat administrasi. Belanja pegawai merupakan jumlah pengeluaran terbesar diantara semua jenis pengeluaran rutin lainnya.

3.5.2.2 Pengeluaran Pembangunan Daerah

Sektor yang mendapat prioritas utama adalah sektor perhubungan dan pariwisata, dengan tujuan lebih memperlancar arus manusia, barang jasa dan informasi serta mendorong pemerataan hasil pembangunan.

3.6 Desentralisasi Fiskal

Salah satu asas pelaksanaan pembangunan dalam UU No.22 tahun 1999 adalah desentralisasi, dimana pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada badan atau organisasi di daerah untuk melaksanakan pembangunan. Wujudnya dengan pemberian otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program regional, sehingga seluruh peranggung jawaban pengelolaan dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Daerah otonom berdasarkan UU No.22 tahun 1999 adalah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Masing-masing daerah otonom mempunyai perangkat pemerintahan yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah berfungsi sebagai kepala daerah otonom dan kepala wilayah administrasi. sebagai kepala daerah otonom, kepala daerah bertugas memimpin wilayah administrasi dan memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah membutuhkan dana yang sangat besar, yang diperoleh dari PAD dan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Rasio antara PAD terhadap total penerimaan merupakan salah satu cara untuk menentukan derajat desentralisasi fiskal (Suparmoko, 1988:307).

BAB IV

GAMBARAAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

4.1 Tinjauan Perekonomian

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian disuatu wilayah dalam satu periode tertentu maka digunakanlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai tolak ukurnya. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas harga konstan didasarkan harga pada tahun dasar.

Pada tahun 2001, PDRB atas dasar harga berlaku di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 6.275.723 juta, atau naik sebesar 17,61% dibandingkan dengan tahun 2000 yang sebesar Rp 5.336. 039 juta. Demikian juga, PDRB tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 15,34% dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya. Adapun pertumbuhan PDRB Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
 Tahun 1997-2001

Tahun	PDRB (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
1997	2.651.660	-
1998	4.118.978	55,34
1999	4.626.452	12,32
2000	5.336.039	15,34
2001	6.275.723	17,61

Sumber: BPS Propinsi BangkaBelitung

PDRB atas dasar harga konstan dari tahun ketahun juga mengalami kenaikan, meskipun kenaikannya tidak seberapa. Pada tahun 2001 nilai PDRB atas dasar harga konstan Propinsi BangkaBelitung sebesar Rp 1.976.771 juta atau naik sebesar 5,56% dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2000 yang sebesar Rp 1.872.602 juta. Adapun pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan selama 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut

Tabel 4.2
 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
 Tahun 1997-2001

Tahun	PDRB (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
1997	1.837.678	-
1998	1.727.351	-6
1999	1.773.302	2,66
2000	1.872.602	5,6
2001	1.976.771	5,56

Sumber: BPS Propinsi BangkaBelitung

4.1.2 Struktur Perekonomian

Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pada tahun 2001 pada umumnya sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 29,23%, sektor tertinggi kedua ada pada sektor angkutan dan komunikasi yaitu sebesar 27,76%, sektor tertinggi selanjutnya berada pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 24,98%. Pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertanian yaitu sebesar 12,22%. Pertumbuhan lapangan usaha di Propinsi Bangka Belitung selama 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.3
 Pertumbuhan Ekonomi Persektor propinsi BangkaBelitung
 Tahun 1999-2001 (dalam %)

Lapangan usaha	1999	2000	2001
Pertanian	21,36	18,46	12,22
Pertamb.dan Penggalian	8,11	16,2	29,23
Industri Pengolahan	4,74	12,75	13,44
Listrik,gas, air bersih	21,86	23,12	13,57
Bangunan	10,31	19,27	12,53
Perdag,hotel, restoran	15,39	13,19	24,98
Angkutan dan komunikasi	22,78	17,37	27,76
Keuangan,sewa dan jasa	10,67	8,74	12,99
Jasa-jasa	11,54	7,29	14,226

Sumber : BPS Propinsi BangkaBelitung

4.2 Kondisi perekonomian Daerah

Selama beberapa tahun terakhir pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Belitung mengalami kemajuan. Selain pembangunan dalam bidang fisik, seperti sarana dan prasarana, dalam bidang perekonomian juga menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Untuk melihat perkembangan perekonomian yang dicapai dapat diketahui dari angka pertumbuhan PDRB sebagai salah satu tolak ukurnya. Adapun

pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung selama 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.4
Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan
Tahun 1997-2001

Tahun	PDRB (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
1997	428.216	-
1998	405.058	-5,41
1999	410.171	1,26
2000	428.024	4,35
2001	448.524	4,48

Sumber :BPS Kabupaten Belitung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ketahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi paa tahun 2001 sebesar 4,48% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1998 sebesar -5,42%.

4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Ekonomi

Pertumbuhan yang terus meningkat disebabkan terjadinya pertumbuhan pada beberapa sektor perekonomian Untuk lebih lengkapnya disajikan pertumbuhan ekonomi persektor dikabupaten Belitung dalam 5 tahun terakhir .

Tabel 4.5
 Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Belitung
 Tahun 1998-2001 (dalam %)

Sektor Ekonomi	1997	1998	1999	2000	2001
Pertanian	2,71	12,45	5,60	7,07	5,84
Pertambangan dan penggalan	4,58	-6,48	-0,35	5,74	3,53
Industri pengolahan	0,78	-11,11	-2,49	2,31	3,86
Listrik, gas dan air	5,11	2,18	15,87	8,95	6,78
Bangunan	21,44	-35,98	0,47	5,78	6,39
Perdagangan, hotel dan restoran	7,89	-1,53	5,83	3,33	5,10
Pengangkutan dan komunikasi	-1,70	-4,55	3,63	7,19	8,91
Persewaan dan jasa	-5,42	1,79	-7,49	2,46	0,88
Jasa-jasa	4,71	0,31	-0,21	2,45	4,37
Rata-rata	5,23	-5,41	1,51	4,39	4,48

Sumber: BPS Kab Belitung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan sektoral pada tahun 2001 mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor jasa dan perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 1,92% dan 1,77%. Pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, hotel dan restoran yang positif ini didukung oleh semakin banyaknya tempat hiburan dan rekreasi baru yang bermunculan yang memerlukan izin dari pemerintah, sedangkan pertumbuhan yang terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran ini didukung oleh pertumbuhan

subsektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 4,71%, hotel sebesar 3,14% dan restoran sebesar 10,22%.

Pertumbuhan tertinggi selanjutnya terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi, persewaan dan jasa perusahaan dan industri pengolahan. Meningkatnya pertumbuhan disektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 1,72% antara lain disebabkan oleh pertumbuhan pada subsektor angkutan laut yaitu sebesar 12,08% dan subsektor jasa penunjang angkutan sebesar 12,07% serta pos dan komunikasi sebesar 11,93%. Pertumbuhan yang positif pada sector persewaan dan jasa perusahaan terjadi karena semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa bank maupun lembaga keuangan non bank.

Industri pengolahan juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik yaitu sebesar 1,55%, ini disebabkan semakin banyaknya usaha-usaha yang muncul dibidang pengolahan terutama pada industri non migas. Sektor yang mengalami pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar -2,21%, menurunnya pertumbuhan ini terutama disebabkan karena eksploitasi dan eksplorasi barang tambang secara berlebihan. Sektor yang mengalami pertumbuhan terkecil kedua terjadi pada sektor listrik, gas dan air yaitu sebesar -2,17%, hal ini terjadi karena semakin sulitnya air bersih diperoleh sehingga masyarakat pengguna air semakin menurun.

Sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -1,23%, hal ini terjadi karena sebagian besar petani belum memanfaatkan lahan pertanian secara optimal dan masih menggunakan cara tradisioanal. Sektor bangunan

mengalami pertumbuhan yang positif meskipun relatif kecil yaitu sebesar 0,61%, pertumbuhan ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

4.4 Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Belitung

Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah perkembangan PDRB perkapita. PDRB perkapita Kabupaten Belitung tahun 2001 sebesar Rp5.138.286 atau meningkat sebesar 11,4 % dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut belum menunjukkan kenaikan daya beli masyarakat karena kenaikan tersebut masih terpengaruh oleh kenaikan harga barang. Kenaikan daya beli masyarakat secara umum tercermin dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan harga konstan PDRB kabupaten Belitung mengalami kenaikan sebesar 1,25 %.

Dengan demikian meskipun secara nominal PDRB Kabupaten Belitung mengalami kenaikan tetapi secara riil daya beli masyarakat mengalami penurunan. Hal ini terjadi antara lain karena kenaikan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tersebut lebih dikarenakan oleh kenaikan harga-harga dibandingkan oleh kenaikan produksi riil

4.5 Keuangan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah agar senantiasa selaras dengan roda pembangunan nasional. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah dapat mewujudkan otonomi daerah secara lebih merata. Kebutuhan dana untuk pembiayaan

pembangunan yang makin meningkat membawa konsekuensi akan perlunya pemanfaatan sumber daya yang ada dan menggali sumber-sumber dana baru secara terus menerus guna meningkatkan penerimaan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam pelaksanaan APBD.

Berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah senantiasa dilakukan agar APBD dikelola secara efektif dan efisien guna mencapai sasaran pembangunan. Untuk itu diperlukan pengawasan agar pengeluaran pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan guna mencapai sasaran pembangunan. Dalam hal ini perlu adanya mekanisme penyelenggaraan yang efektif, tertib dan terkendali.

BAB V

ANALISIS DATA

5.1 Interpretasi Data

Didalam bab ini membahas mengenai data yang telah diolah, serta pembahasan hasil olah data tersebut. Terdapat tahap-tahap yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu:

5.1.1 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah oleh pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang terkait dan mendukung tujuan penelitian ini. Data yang digunakan bersumber antara lain dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan dan dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Ternyata tidak semua data yang diperoleh dapat mencukupi estimasi dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Kendala ini terjadi karena pihak BPS di Kabupaten Belitung tidak memiliki data statistik yang lengkap. Sehingga penulis menggunakan metode interpolasi. Formula yang digunakan dalam melakukan interpolasi adalah sebagai berikut (Aliman, 2000:79)

$$Y_{11} = \frac{1}{4} \left\{ Y_t + \frac{4.5}{12} (Y_t - Y_{t-1}) \right\}$$

$$Y_{12} = \frac{1}{4} \left\{ Y_t + \frac{1.5}{12} (Y_t - Y_{t-1}) \right\}$$

$$Y_{13} = \frac{1}{4} \left\{ Y_t + \frac{1.5}{12} (Y_t - Y_{t-1}) \right\}$$

$$Y_{t+1} = \frac{1}{4} Y_t + \frac{4.5}{12} (Y_t - Y_{t-1})$$

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Derajat fiskal daerah

Seperti telah disebutkan pada bab terdahulu, derajat fiskal daerah ini diperoleh dengan menggunakan "*administrative independency ratio*", yang merupakan rasio antara PAD dengan total penerimaan daerah dan tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Data yang tersedia adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

TAHUN	DERAJAT FISKAL
1995	1.826145
1996	1.469105
1997	0.864602
1998	1.539755
1999	2.530541
2000	0.813294
2001	0.482192

Sumber: BPS Kabupaten Belitung

2. Rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah

Data ini merupakan total transfer pemerintah pusat atas penerimaan daerah. Adapun data yang tersedia adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2

TAHUN	RASIO
1995	0.766256
1996	0.674488
1997	0.618679
1998	0.697831
1999	0.79869
2000	0.67885
2001	0.536275

Sumber: BPS Kabupaten Belitung

3. Tingkat perkembangan ekonomi

Data tingkat perkembangan ekonomi ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB konstan.

Tabel 5.3

TAHUN	PERKEMBANGAN EKONOMI
1995	8.760267
1996	7.493872
1997	5.226738
1998	-5.40802
1999	1.513117
2000	4.388028
2001	4.84146

Sumber: BPS Kabupaten Belitung

5.2 Analisis Hasil Regresi

Dari hasil perhitungan model regresi yang digunakan dengan bantuan program E views 3 diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 5.4
Hasil Regresi

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob.
NEWC	-0.662817	0.118986	-5.570567	0.0000
NEWX1	8.455251	1.139299	7.421453	0.0000
NEWX2	0.003662	0.019609	0.186754	0.8535
R-squared	0.705850			
Adjusted R-squared	0.680272			
F-statistik	27.59569			
Prob(F-statistik)	0.000001			
Durbin-Watson stat	1.922626			

Sumber: Lampiran 3

Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model regresi linear maka parameter regresi merupakan koefisien dari variabel yang bersangkutan. Karena diregresi awal nilai dari D-W terkena Autokorelasi maka estimasi dirubah dengan menggunakan *iterasi Cochrane-Orcutt*. Untuk mendapatkan nilai ρ , *Cochrane-Orcutt* merekomendasikan dilakukan regresi atau estimasi yang bersifat iterasi sampai mendapatkan nilai ρ yang terbaik atau nilai ρ yang menjamin tidak diketemukannya lagi masalah autokorelasi dalam model empiris yang sedang diamati (Aliman, 2000:80). Berdasarkan hasil estimasi data dalam bentuk persamaan regresi linear adalah sebagai berikut:

$$\text{NewY} = -0.662817 + 8.455251 \text{ NewX1} + 0.003662 \text{ NewX2}$$

5.3 Pengujian Statistik

Pengujian statistik meliputi pengujian secara serempak (Uji-F), koefisien determinasi (R^2), pengujian secara parsial (Uji-t).

5.3.1 Pengujian Secara Serempak(UjiF-Statistik)

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji F. Dari pengujian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

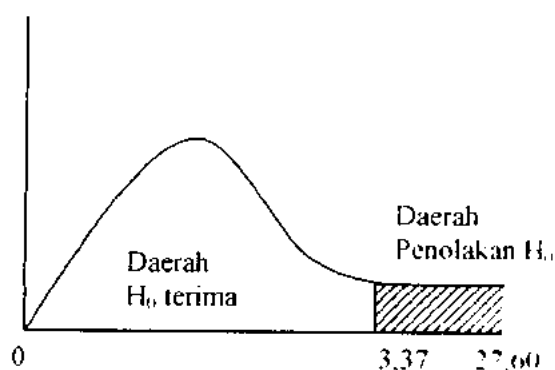
$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 \dots \beta_i = 0$$

Dimana secara serempak variabel-variabel independen (rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah dan Tingkat perkembangan ekonomi), tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (derajat fiskal daerah)

$$H_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_i \neq 0$$

Dimana secara serempak variabel-variabel independen (Rasio total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan daerah dan Tingkat perkembangan ekonomi), berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Derajat fiskal daerah). F-hitung = 27.59569 F-tabel = 3.37 $\alpha = 5$

Gambar 5.1
Kurva Uji F-Statistik
Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen



Karena F-hitung > F-tabel H₀ ditolak, artinya secara serempak variabel-variabel independen (Rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan

daerah dan tingkat perkembangan ekonomi) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Derajat fiskal daerah)

5.3.2 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) = 0.705850 yang berarti variabel- variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 71%, artinya sebesar 71% variabel dependen (derajat fiskal daerah) dipengaruhi oleh variabel independen (rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah dan tingkat perkembangan ekonomi) dan 29% dipengaruhi variabel-variabel diluar model.

5.3.3 Pengujian Secara Parsial (Uji t-Statistik)

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan secara lengkap ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.7
Hasil Pengujian t-Statistik

VARIABEL	KOEFISIEN	t- TEST	t-TABEL	α	KETERANGAN
NEWX1	8.455251	7.421453	1.71	5%	Signifikan
NEWX2	0.003662	0.186754	1.71	5%	Tidak Signifikan

Sumber: Lampiran 3

1. Pengaruh variabel rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah

$H_0 = \beta_1 \leq 0$, dimana secara individu variabel rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel derajat fiskal daerah.

$H_0 = \beta_1 > 0$, dimana secara individu variabel rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel derajat fiskal daerah.

Dari pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

$$t\text{-hitung} = 7,421453$$

$$t\text{-tabel} = 1,71$$

$$\alpha = 5\%$$

Karena $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya secara individu variabel rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan secara signifikan berpengaruh terhadap derajat fiskal daerah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel derajat fiskal daerah terbukti.

2. Pengaruh variabel tingkat perkembangan ekonomi terhadap derajat fiskal daerah.

$H_0 = \beta_1 \leq 0$, dimana secara individu variabel tingkat perkembangan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel derajat fiskal daerah.

$H_a = \beta_1 > 0$, dimana secara individu variabel tingkat perkembangan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel derajat fiskal daerah.

Dari pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

$$t\text{-hitung} = 0,186754$$

$$t\text{-tabel} = 1,71$$

$$\alpha = 5\%$$

Karena $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, artinya secara individu variabel tingkat perkembangan ekonomi tidak berpengaruh terhadap variabel derajat fiskal daerah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel tingkat perkembangan ekonomi secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel derajat fiskal daerah tidak terbukti.

5.4 Pengujian Asumsi Klasik

5.4.1 Pengujian Autokorelasi

Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Salah satu dalam asumsi model non linear klasik adalah tidak terjadinya autokorelasi dalam kesalahan pengganggu atau gangguan dengan menggunakan:

$$E(U_i U_j) = 0 \quad i \neq j$$

Karena asumsi ini tidak terpenuhi maka estimasi OLS yang diperoleh tidak lagi efisien karena selang keyakinan (*Confidence Interval*) akan semakin

melebar. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson sebagai berikut:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{t=n} (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{t=n} e_t^2}$$

Dalam penelitian ini menggunakan estimasi *iterasi Cochrane-Orcut*. Diasumsikan bahwa u_t adalah mengikuti skema autoregresif derajat satu (*first-order autoregressive*), yaitu:

$$U_t = \rho u_{t-1} + e_t \quad (1)$$

Dimana nilai absolut ρ dan e_t diasumsikan sama dengan nol dan dengan varian yang konstan dan tidak saling berkorelasi. Selanjutnya, dari hasil persamaan 1, kemudian dilakukan estimasi dengan persamaan (2) berikut:

$$(Y_t - \rho Y_{t-1}) = a_0(1 - \rho) + a_1(X1_t - X1_{t-1}) + a_2(X2_t - X2_{t-1}) + u_t \quad (2)$$

Selanjutnya melakukan proses iterasi yang kedua, dengan estimasi sebagai berikut:

$$UU_t = \rho uut_{-1} + e_t \quad (3)$$

Langkah berikutnya, dari hasil persamaan (3), kemudian dilakukan estimasi dengan persamaan (4) berikut:

$$(New Y_t - \rho New Y_{t-1}) = a_0(1 - \rho) + a_1(New X1_t - \rho New X1_{t-1}) + a_2(New X2_t - \rho New X2_{t-1}) + u_t \quad (4)$$

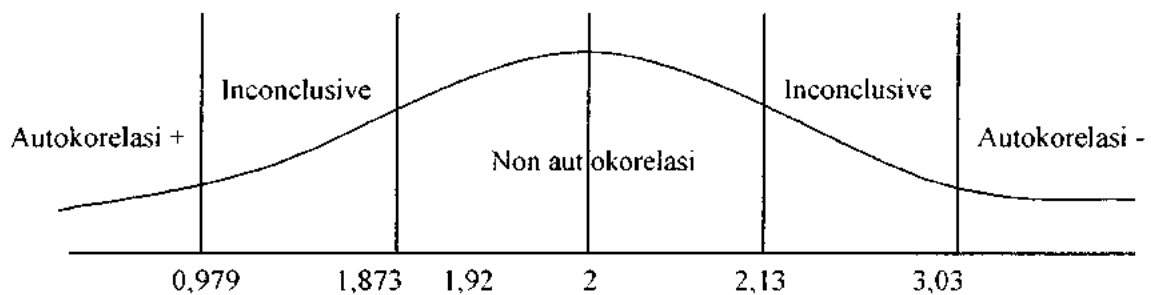
Karena u_t memenuhi semua asumsi OLS, sehingga hasil estimasi persamaan (2) akan BLUE (*best linear unbiased estimator*) Berdasarkan perhitungan dengan estimasi *generalized difference equation* diperoleh nilai D-W test sebesar 1,92

Nilai D-W untuk $d_L(\alpha; k; n) = (0,05; 2; 26) = 0,979$

Nilai D-W untuk $d_u(\alpha; k; n) = (0,05; 2; 26) = 1,873$

Nilai D-W test sebesar 1,92 berada diantara d dan $(4-d)$ yang berarti berada didaerah tidak ada autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif.

Gambar 5.2
Uji Autokorelasi



Jika D-W tes lebih kecil d_l atau lebih besar dari $(4-d_l)$, maka hipotesis ditolak berarti terdapat autokorelasi. Jika D-W terletak diantara d_u dan $(4-d_u)$, maka hipotesis nol diterima, berarti tidak terdapat autokorelasi. Jika D-W terletak diantara d_l dan d_u atau diantara $(4-d_u)$ dan $(4-d_l)$ maka pengujian tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Dari hasil perbaikan perhitungan diperoleh nilai D-W sebesar 1,92 yang berarti terletak diantara d_u dan $(4-d_u)$ dengan kata lain tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

5.4.2 Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi bila variabel gangguan tidak mempunyai varians yang konstan untuk semua observasi. Akibat dari adanya heteroskedastisitas yaitu penafsiran OLS tetap tidak bias dan tidak efisien. Untuk

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan uji Gletser.

Dengan menggunakan bantuan dari program E views diperoleh hasil yang signifikan dengan $\alpha=5\%$ dan t-tabel 1,71, karena t-hitung < t-tabel maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Kesimpulan dari hasil data yang diolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

VARIABEL	t - TEST	t - TABEL	KETERANGAN
NEWX1	-0,649348	1,71	Tidak ada heteroskedastisitas
NEWX2	1,441674	1,71	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber : Lampiran 4

5.4.3 Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel independen yang satu merupakan fungsi dari variabel lainnya.

Uji ini pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah ada hubungan linear diantara variabel-variabel dalam model regresi. Dengan menggunakan teori Klein, yaitu dengan melakukan regresi antar variabel penjelasnya (independen). Untuk mengetahui besarnya r^2 dari masing-masing hubungan antara variabel independen tersebut lebih besar atau lebih kecil dari R^2 (regresi awal)

Tabel 5.9
Pengujian Multikolinearitas

VARIABEL	R ² VARIABEL INDEPENDEN	R ² VARIABEL PENJELAS	KETERANGAN
NEWLNX1-NEWLNX2	0.004960	0.705850	Tidakada multikolinearitas

Sumber:Lampiran 5

Hasil dari tabel diatas terlihat bahwa R² variabel penjelas > R² variabel independen sehingga dapat disimpulkan bahwa antara rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah dan tingkat perkembangan ekonomi tidak terjadi multikolinearitas.

5.5 Analisis Estimasi

Dari hasil estimasi atau persamaan yang didapat,maka hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen adalah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi untuk X1 (rasio total transfer pemerintah terhadap total penerimaan daerah) sebesar 8.455251,artinya setiap terjadi penambahan rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah 1 juta rupiah, maka akan menyebabkan kenaikan derajat fiskal daerah sebesar 8.455251 juta cateris paribus.
2. Nilai koefisien regresi untuk X2 (tingkat perkembangan ekonomi) sebesar 0.003662,namun karena tidak signifikan secara statistik maka tidak bisa dijelaskan lebih lanjut

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diketengahkan pada bab v, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengolahan data kurun waktu 1995-2001 dengan menggunakan variabel dependen derajat fiskal daerah serta variabel independen rasio total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan dan tingkat perkembangan ekonomi, diperoleh R^2 sebesar 71% yang berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 71% dan sebesar 29% dipengaruhi faktor-faktor lain diluar model.
2. Pengujian variabel independen secara serempak ditunjukkan nilai F-hitung sebesar 27.59569 dan berada didaerah penolakan H_0 , artinya secara bersama-sama variabel independen (Rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan dan tingkat perkembangan ekonomi) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel derajat fiskal daerah kabupaten Belitung
3. Variabel rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan berpengaruh signifikan terhadap derajat fiskal daerah.
4. Variabel tingkat perkembangan ekonomi tidak berpengaruh terhadap derajat fiskal daerah, hal ini disebabkan karena penerimaan PDRB kabupaten Belitung masih sangat terbatas.

5. Tidak terdapat penyimpangan terhadap asumsi klasik yang meliputi heteroskedastisitas dan multikolinearitas, pada uji autokorelasi pada mulanya terjadi gangguan tetapi setelah diobati pengujian lolos. Maka pengujian statistik yang meliputi uji t dan uji F dianggap valid.

6.2 Implikasi

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka berkaitan dengan tujuan otonomi fiskal daerah yaitu mewujudkan sumber-sumber pendapatan yang efektif bagi daerah implikasi yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

1. Untuk masa yang akan datang pemerintah harus lebih mendorong laju pertumbuhan PAD guna mendukung derajat fiskal daerah, semakin besar derajat fiskal daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah pada pusat.
2. Semakin kecil rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah pada pusat, sehingga pemerintah daerah sedapat mungkin mengurangi transfer dari pemerintah pusat dengan mendorong penerimaan PAD yang bersumber dari pajak, restribusi, hasil perusahaan daerah dan penerimaan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi pertama, UGM, Yogyakarta, 2001
- Aliman, *Modul Ekonometrika Terapan*, PAU UGM, Yogyakarta, 2000
- Badan Pusat Statistika, Daerah Tingkat II Belitung, *Kabupaten Belitung dalam Angka*, Belitung, 2000
- Gujarati, Damador, *Basic Econometric* Mc Grow, Inc. Singapura, 1995
- Jaka Sriyana, "*Hubungan Keuangan Pusat Daerah Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah*" Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi UII, Vol.4, No.1, 1995
- K.J.Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. UI, Jakarta, 1998
- Mardiasmo, "*Globalisasi Perekonomian, Sistem Ekonomi Nasional dan Otonomi Daerah*", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi UII, Vol.4, No 1, 2000
- Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- M.Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Paktek*, BPFE, Yogyakarta, 1988
- Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, Ratu Agung, Jakarta, 2001
- Susiati B.Hirawan, "*Analisis Keuangan Daerah di Indonesia*", Ekonomi Keuangan Indonesia, LPEM FE UI, Vol XXXIV, No.1, 1986
- Sutrisno PH, *Ekonomi Publik I*, Universitas Terbuka, Materi Pokok 6, 1986

LAMPIRAN

obs	Y	X1	X2
1995:1	0.401712	0.188280	2.161858
1995:2	0.438262	0.190469	0.655274
1995:3	0.474811	0.192659	1.737113
1995:4	0.511360	0.194848	0.992582
1996:1	0.400749	0.177225	1.291834
1996:2	0.378434	0.171490	1.001535
1996:3	0.356119	0.165754	1.127218
1996:4	0.333804	0.160019	0.959387
1997:1	0.272823	0.159902	0.842292
1997:2	0.235041	0.156414	0.783218
1997:3	0.197260	0.152926	0.683204
1997:4	0.159478	0.149438	0.612077
1998:1	0.321643	0.167037	-0.786873
1998:2	0.363840	0.171984	-0.464457
1998:3	0.406037	0.176931	-1.356623
1998:4	0.448234	0.181878	-1.391790
1999:1	0.539749	0.190217	0.711459
1999:2	0.601673	0.196521	-0.340006
1999:3	0.663597	0.202824	0.834470
1999:4	0.725521	0.209128	0.438340
2000:1	0.364315	0.180948	0.518195
2000:2	0.256987	0.173458	0.641532
2000:3	0.149660	0.165967	0.734188
2000:4	0.042332	0.158477	0.848493
2001:1	0.151589	0.147435	0.569166
2001:2	0.130895	0.138524	0.794596
2001:3	0.110201	0.129613	0.663874
2001:4	0.089507	0.120702	0.784450

Uji Autokorelasi
Metode interaksi Cochrane-Orcutt

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/25/03 Time: 00:25
Sample: 1995:1 2001:4
Included observations: 28

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.900741	0.115109	-7.825081	0.0000
X1	7.337804	0.665044	11.03356	0.0000
X2	-0.016377	0.018255	-0.897084	0.3782
R-squared	0.831720	Mean dependent var		0.340201
Adjusted R-squared	0.818258	S.D. dependent var		0.176462
S.E. of regression	0.075228	Akaike info criterion		-2.235629
Sum squared resid	0.141481	Schwarz criterion		-2.092893
Log likelihood	34.29881	F-statistic		61.78102
Durbin-Watson stat	0.602552	Prob(F-statistic)		0.000000

Dependent Variable: U
Method: Least Squares
Date: 05/25/03 Time: 01:11
Sample(adjusted): 1995:2 2001:4
Included observations: 27 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
U(-1)	0.705592	0.149710	4.713073	0.0001
R-squared	0.460292	Mean dependent var		0.002030
Adjusted R-squared	0.460292	S.D. dependent var		0.072838
S.E. of regression	0.053510	Akaike info criterion		-2.981547
Sum squared resid	0.074447	Schwarz criterion		-2.933553
Log likelihood	41.25089	Durbin-Watson stat		1.386589

Dependent Variable: NY
Method: Least Squares
Date: 05/25/03 Time: 00:26
Sample(adjusted): 1995:2 2001:4
Included observations: 27 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MC	-0.289125	0.049414	-5.851135	0.0000
NX1	7.885110	0.987355	7.986097	0.0000
NX2	0.001446	0.018466	0.078300	0.9382
R-squared	0.728433	Mean dependent var		0.091328
Adjusted R-squared	0.705802	S.D. dependent var		0.100574
S.E. of regression	0.054551	Akaike info criterion		-2.874916
Sum squared resid	0.071420	Schwarz criterion		-2.730934
Log likelihood	41.81137	F-statistic		32.18795
Durbin-Watson stat	1.330120	Prob(F-statistic)		0.000000

Dependent Variable: UU
 Method: Least Squares
 Date: 05/25/03 Time: 01:12
 Sample(adjusted): 1995:3 2001:4
 Included observations: 26 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UU(-1)	0.321930	0.196711	1.636560	0.1143
R-squared	0.096704	Mean dependent var		0.000436
Adjusted R-squared	0.096704	S.D. dependent var		0.053399
S.E. of regression	0.050751	Akaike info criterion		-3.086054
Sum squared resid	0.064393	Schwarz criterion		-3.037665
Log likelihood	41.11870	Durbin-Watson stat		1.994022

Dependent Variable: NEWY
 Method: Least Squares
 Date: 05/25/03 Time: 00:24
 Sample(adjusted): 1995:3 2001:4
 Included observations: 26 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
NEWC	-0.662817	0.118986	-5.570567	0.0000
NEWX1	8.455251	1.139299	7.421453	0.0000
NEWX2	0.003662	0.019609	0.186754	0.8535
R-squared	0.705850	Mean dependent var		0.058500
Adjusted R-squared	0.680272	S.D. dependent var		0.093027
S.E. of regression	0.052601	Akaike info criterion		-2.943980
Sum squared resid	0.063639	Schwarz criterion		-2.798815
Log likelihood	41.27174	F-statistic		27.59569
Durbin-Watson stat	1.922626	Prob(F-statistic)		0.000001

Hasil Regresi Setelah Diobati

Dependent Variable: NEWY

Method: Least Squares

Date: 05/25/03 Time: 00:27

Sample(adjusted): 1995:3 2001:4

Included observations: 26 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
NEWC	-0.662817	0.118986	-5.570567	0.0000
NEWX1	8.455251	1.139299	7.421453	0.0000
NEWX2	0.003662	0.019609	0.186754	0.8535
R-squared	0.705850	Mean dependent var		0.058500
Adjusted R-squared	0.680272	S.D. dependent var		0.093027
S.E. of regression	0.052601	Akaike info criterion		-2.943980
Sum squared resid	0.063639	Schwarz criterion		-2.798815
Log likelihood	41.27174	F-statistic		27.59569
Durbin-Watson stat	1.922626	Prob(F-statistic)		0.000001

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1995:3	0.11574	0.12407	-0.00833	*
1995:4	0.12303	0.12778	-0.00474	*
1996:1	-0.01683	-0.03692	0.02009	*
1996:2	0.08281	0.07247	0.01035	*
1996:3	0.05830	0.03977	0.01853	*
1996:4	0.05385	0.03004	0.02381	*
1997:1	0.01072	0.06723	-0.05651	*
1997:2	0.03053	0.02804	0.00249	*
1997:3	0.01772	0.02845	-0.01072	*
1997:4	0.01018	0.02245	-0.01227	*
1998:1	0.20258	0.18998	0.01261	*
1998:2	0.06957	0.07510	-0.00553	*
1998:3	0.10525	0.10661	-0.00137	*
1998:4	0.11367	0.11448	-0.00081	*
1999:1	0.17141	0.16107	0.01034	*
1999:2	0.14889	0.14463	0.00426	*
1999:3	0.16797	0.16086	0.00711	*
1999:4	0.18033	0.17182	0.00851	*
2000:1	-0.23044	-0.11111	-0.11933	*
2000:2	0.04745	0.08427	-0.03682	*
2000:3	-0.03165	0.03170	-0.06335	*
2000:4	-0.05307	0.01919	-0.07226	*
2001:1	0.14209	-0.02474	0.16683	*
2001:2	-0.01525	-0.01754	0.00229	*
2001:3	0.01014	-0.03684	0.04698	*
2001:4	0.00601	-0.05186	0.05786	*

Uji Multikolinieritas

Dependent Variable: NEWX1

Method: Least Squares

Date: 05/25/03 Time: 01:03

Sample(adjusted): 1995:3 2001:4

Included observations: 26 after adjusting endpoints.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.032274	0.001924	16.77708	0.0000
NEWX2	-0.001212	0.003505	-0.345886	0.7324
R-squared	0.004960	Mean dependent var		0.032089
Adjusted R-squared	-0.036500	S.D. dependent var		0.009257
S.E. of regression	0.009424	Akaike info criterion		-6.417223
Sum squared resid	0.002132	Schwarz criterion		-6.320446
Log likelihood	85.42390	F-statistic		0.119637
Durbin-Watson stat	1.408849	Prob(F-statistic)		0.732442

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1995:3	0.03972	0.03173	0.00799	*
1995:4	0.04015	0.03172	0.00843	*
1996:1	0.02078	0.03202	-0.01124	*
1996:2	0.03365	0.03183	0.00182	*
1996:3	0.02980	0.03189	-0.00208	*
1996:4	0.02866	0.03190	-0.00325	*
1997:1	0.03313	0.03211	0.00102	*
1997:2	0.02846	0.03201	-0.00355	*
1997:3	0.02853	0.03207	-0.00354	*
1997:4	0.02783	0.03211	-0.00427	*
1998:1	0.04822	0.03373	0.01450	*
1998:2	0.03429	0.03277	0.00153	*
1998:3	0.03816	0.03314	0.00501	*
1998:4	0.03914	0.03330	0.00584	*
1999:1	0.04352	0.03014	0.01338	*
1999:2	0.04238	0.03239	0.01000	*
1999:3	0.04410	0.03183	0.01227	*
1999:4	0.04536	0.03172	0.01364	*
2000:1	0.01214	0.03239	-0.02025	*
2000:2	0.03503	0.03180	0.00323	*
2000:3	0.02884	0.03186	-0.00302	*
2000:4	0.02734	0.03182	-0.00447	*
2001:1	0.02230	0.03223	-0.00994	*
2001:2	0.02303	0.03190	-0.00887	*
2001:3	0.02077	0.03196	-0.01119	*
2001:4	0.01899	0.03195	-0.01296	*

Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABSU

Method: Least Squares

Date: 05/25/03 Time: 01:02

Sample(adjusted): 1995:3 2001:4

Included observations: 26 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
NEWX1	-0.707594	1.089699	-0.649348	0.5225
NEWX2	0.027039	0.018755	1.441674	0.1629
C	0.071208	0.036637	1.943595	0.0643
R-squared	0.103141	Mean dependent var		0.052617
Adjusted R-squared	0.025153	S.D. dependent var		0.050956
S.E. of regression	0.050311	Akaike info criterion		-3.033003
Sum squared resid	0.058218	Schwarz criterion		-2.887838
Log likelihood	42.42904	F-statistic		1.322530
Durbin-Watson stat	1.067514	Prob(F-statistic)		0.285974

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1995:3	0.01320	0.05527	-0.04207	*
1995:4	0.00760	0.05506	-0.04747	*
1996:1	0.02289	0.06225	-0.03936	*
1996:2	0.04149	0.05740	-0.01591	*
1996:3	0.06009	0.05879	0.00130	*
1996:4	0.07869	0.05918	0.01951	*
1997:1	0.01579	0.05136	-0.03557	*
1997:2	0.00179	0.05689	-0.05510	*
1997:3	0.01221	0.05550	-0.04328	*
1997:4	0.02621	0.05522	-0.02901	*
1998:1	0.00951	0.00468	0.00483	*
1998:2	0.01122	0.03595	-0.02473	*
1998:3	0.01294	0.02482	-0.01187	*
1998:4	0.01466	0.02053	-0.00587	*
1999:1	0.04048	0.08801	-0.04753	*
1999:2	0.06150	0.03869	0.02282	*
1999:3	0.08253	0.04992	0.03261	*
1999:4	0.10355	0.05136	0.05219	*
2000:1	0.05440	0.06011	-0.00571	*
2000:2	0.10497	0.05697	0.04800	*
2000:3	0.15554	0.05999	0.09555	*
2000:4	0.20611	0.06202	0.14409	*
2001:1	0.01863	0.05633	-0.03770	*
2001:2	0.02602	0.06320	-0.03718	*
2001:3	0.07067	0.06356	0.00711	*
2001:4	0.11533	0.06497	0.05035	*